NOTARIS

DOLY TAMPUNG SITORUS, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU- 00066.AH.02.01 TAHUN 2017 TANGGAL 24 JANUARI 2017

SALINAN / TURUNAN AKTA

AKTA	:	PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT MUSYAWARAH NASIONAL PERKUMPULAN PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SE-INDONESIA
NOMOR	:	05
TANGGAL	:	18 Juli 2022

JL. Ryacudu Perum Korpri Blok A7 No. 22, Kelurahan Korpri Raya,
Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung
HP. 0852 0838 3002 / 0812 7981 859
E-mail : doly.notaris@gmail.com

DOLY TAMPUNG SITORUS, SH. M.Kn
Notaris
Bandar Lampung

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
MUSYAWARAH NASIONAL PERKUMPULAN
PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN
HUKUM ADIMINISTRASI NEGARA SE-INDONESIA

Nomor : 05

-Pada hari ini, hari Senin, Tanggal 18-07-2022 (delapan belas Juli dua ribu dua puluh dua). ----------
-pukul 12.30 WIB (dua belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat), sampai dengan selesai dibacakannya minuta akta ini. ----------
-Hadir menghadap saya, **DOLY TAMPUNG SITORUS, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 Januari 2017, nomor : AHU-00066.AH.02.01.TAHUN 2017 diangkat sebagai Notaris di Kota Bandar Lampung dengan wilayah jabatan Provinsi Lampung, dengan dihadiri oleh para saksi akta yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: ----------

- Tuan **RIFANDY RITONGA, Sarjana Hukum, Magister Hukum,** lahir di Kotabumi, pada tanggal 22-02-1990 (dua puluh dua Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Jalan Purnawirawan Gang Swadaya 5.C, Rukun Tetangga -, Rukun Warga -, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1803092202900001 ; ---------

-menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Penghadap bertindak selaku Kuasa yang diberikan kepadanya, yang akan disebut di bawah ini dan termuat dalam Berita Acara Rapat Musyawarah Nasional Perkumpulan Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum

Administrasi Negara Se-Indonesia, tanggal 16 Februari 2021, yang kebenaran dan keasliannya dijamin oleh Penghadap yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup dan aslinya dilekatkan dalam minuta akta ini, selaku kuasa dari : ----------

- Tuan **Profesor, Doktor, M. GUNTUR HAMZAH, Sarjana Hukum., Magister Hukum**, Warga Negara Indonesia, lahir di Ujung Pandang, tanggal 08-01-1965 (delapan Januari seribu Sembilan ratus enampuluh lima), Dosen, bertempat tinggal di Perumahan Dosen Unhas Blok AB Nomor 18, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor (NIK): 7371140801650001; ----------
- Tuan **Profesor, Doktor, MOHAMAD MAHFUD MD, Sarjana Hukum**, Warga Negara Indonesia, lahir di Sampang, tanggal 13-05-1957 (tigabelas Mei seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Dosen, bertempat tinggal di Sleman, Sambeligi Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 053, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor (NIK): 3404071305570001; ----------
- Tuan **Doktor, BAYU DWI ANGGONO, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, Warga Negara Indonesia, lahir di Sidoarjo, tanggal 23-06-1982 (duapuluh tiga Juni seribu sembilan ratus delapanpuluh dua), Dosen, bertempat tinggal di Perum Pesona Regency Blok AB Nomor 13, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 020, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor (NIK): 3511022306820002; ----------

-Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya sah sebagai kuasa dari dan atas nama

Segenap Anggota Pengurus Perkumpulan **PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**, yaitu suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Undang-undang dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya dalam Akta ini cukup disingkat **"Perkumpulan"**, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang Anggaran Dasar Pendiriannya dimuat dalam Akta Nomor : 2, Tanggal 03-03-2016 (tiga Maret tahun dua ribu enambelas), dibuat dihadapan **HAMBIT MASEH, Sarjana Hukum**, Notaris Jakarta Pusat, yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rupublik Indonesia, dengan nomor Surat Keputusan : **AHU-0031151.AH.01.07.Tahun 2016, Tanggal 15-03-2016**,(lima belas Maret dua ribu enambelas) tentang pengesahan badan hukum Perkumpulan dan menurut keterangan Penghadap, Akta tersebut belum pernah mengalami perubahan. dan salinan asli Akta Pendirian Perkumpulan serta surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan fotokopinya dilekatkan pada minuta Akta ini. ----------

-Selanjutnya menurut keterangan Penghadap, hingga saat Akta ini ditandatangani tidak ada dan/atau belum ada Akta lain selain Akta yang telah disebutkan di atas; --

-Penghadap telah dikenal oleh Saya, Notaris dari identitasnya. ----------

-Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, menerangkan kepada saya, Notaris : ----------

- Bahwa Perkumpulan **PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADIMINISTRASI NEGARA SE-INDONESIA**, telah melaksanakan Musyawah Nasional pada hari Kamis, tanggal 4-02-2021 (empat Februari dua ribu dua puluh satu), di Hotel Mercure, Kota Samarinda,

Provinsi Kalimantan Timur. Sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat Musyarah Nasional tersebut. ----------

- Bahwa dalam rapat ini baik secara luring dan during, hadir semua anggota Perkumpulan, dengan demikian telah mencapai sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 1 anggaran dasar Perkumpulan; -------
- bahwa karena telah mencapai kuorum sebagaimana yang disyaratkan, dengan demikian Musyawarah Nasiona; tersebut adalah sah penyelenggaraannya, susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai segala hal yang akan dibicarakan dalam Rapat. ----------
- Dengan demikian seluruh Anggota Perkumpulan yang hadir dan telah sah untuk dapat mengambil keputusan atau kuorum sesuai dengan Pasal 37 Anggaran Dasar Perkumpulan tentang Pengesahan dan Perubahan Anggaran Dasar.----------
- Bahwa Agenda Acara dalam MUSYAWARAH NASIONAL PERKUMPULAN PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SE-INDONESIA tersebut adalah sebagai berikut : ----------

1. Pembukaan.----------
2. Pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.----------
3. Pemilihan Pengurus Pusat Perkumpulan Periode 2021 s/d 2025.----------
4. Lain-lain/Penutup.----------

-Bahwa sesuai Kuasa yang tercantum dalam BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH NASIONAL PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SE-INDONESIA, tersebut, maka Penghadap tersebut hendak menyatakan keputusan Rapat tersebut kedalam suatu Akta Notariil yaitu dengan Akta ini. ----------

-Berhubung dengan apa yang diuraikan diatas, maka Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menyatakan bahwa Musyawarah Nasional Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Se-Indonesia yang telah diadakan pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas dengan suara bulat telah memutuskan hal-hal sebagai berikut: -

1. Menyetujui untuk merubah alamat Perkumpulan dalam Anggaran Dasar yang dibuat dengan Akta Pendirian Perkumpulan Nomor 2, tanggal 3 Maret 2016 di hadapan HAMBIT MASEH, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sehingga alamat Perkumpulan sekarang adalah sebagai berikut: ----------

   -Perkumpulan PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SE-INDONESIA ini beralamat di Jalan Kramat VI Nomor 18, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat.---

2. Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Se-Indonesia tahun 2021, di Hotel Mercure, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, telah terpilih Tuan Profesor Doktor, M. Guntur Hamzah, Sarjana Hukum., Magister Hukum dan Tuan Doktor, Bayu Dwi Anggono, Sarjana Hukum., Magister Hukum, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Se-Indonesia (APHTN-HAN) untuk Periode 2021-2025.----------

   -Maka dengan demikian, menyetujui untuk merubah Anggaran Dasar Bab XI Ketentuan Penutup Pasal 38 ayat 2 tentang Badan Pengurus dan Badan Pengawas, dan untuk Struktur Pengurus Pusat Periode 2021 s/d 2025 telah mendapatkan Surat Keputusan Nomor : 01.01/APHTN-HAN/II/2021, tanggal 16 Februari 2021. Sehingga Badan Pengurus dan Badan Pengawas

Perkumpulan sekarang periode 2021 sampai dengan 2025 sebagai berikut : ----------

A. BADAN PENGURUS. ----------

1. KETUA UMUM : **Tuan Profesor Doktor,**------- **M.Guntur Hamzah, Sarjana Hukum, Magister Hukum,** lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 08-01-1965 (delapan Januari seribu Sembilan ratus enam puluh lima, Dosen, bertempat tinggal di Perum Dosen Unhas Blok AB nomor 18, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pemegang kartu tanda penduduk NIK :-------- 7371140801650001.----------

2. SEKRETARIS JENDRAL : **Tuan Doktor. Bayu Dwi ------ Anggono, Sarjana Hukum., Magister Hukum,** lahir di Sidoarjo, pada tanggal 23-06-1982 (dua puluh tiga Juni seribu Sembilan ratus delapan puluh dua), Dosen, bertempat tinggal di Perum Pesona Regency Blok AB Nomor 13, rukun tetangga 002, rukun warga 020, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang,- Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK:

3511022306820002. ----------

3. **BENDAHARA** : **Tuan Doktor. Duke Arie ----- Widagdo, Sarjana Hukum., Magister Hukum,** lahir di Sungai Pakning, 12-12-1976 (dua belas Desember seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam), Dosen, bertempat tinggal di Perum Graha 42 Blok E. 10, rukun tetangga 002, rukun warga 004, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatama, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pemegang kartu tanda penduduk NIK:7571031212760001.-------

B. BADAN PENGAWAS. ----------

KETUA : **Profesor. Doktor. Moh.------ Mahfud MD, Sarjana Hukum.** Lahir di Sampang, pada tanggal 13-05-1957 (tiga belas Mei seribu Sembilan ratus lima puluh tujuh, Dosen, bertempat tinggal di Sleman, Sembilegi Baru, rukun tetangga 001, rukun warga 053, kelurahan Maguwoharjo,Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta, pemegang kartu tanda penduduk NIK:---3404071305570001. ---------

- Susunan Pengurus dan Departemen Pengurus Pusat Perkumpulan Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Se-Indonesia(APHTN-HAN) masa bakti

2021-2025 akan di lengkapi oleh Ketua Umum da Sekretaris Jendral terpilih sesuai kebutuha Perkumpulan APHTN-HAN berdasarkan ketentuan Anggara Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan APHTN HAN.----------

- Segala ketentuan Anggaran Dasar yang dimuat dalam akt pendirian perkumpulan nomor 2, tanggal 03-03-201 (tiga Maret dua ribu enambelas), yang dibuat dihadapa Hambit Maseh, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat yang tidak dirubah dengan akta ini tetap berkalu da mengikat perkumpulan Pengajar Hukum Tata Negara da Hukum Administrasi Negara Se-indonesia (APHTN-HAN) da pihak ketiga lainnya. ----------

- Untuk selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan da menjamin kebenaran identitas penghadap sesuai denga tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas ha tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengetahui dan memahami isi akta ini. ---------

---------- **Demikian akta ini** ----------

-Dibuat sebagai Minuta dan dilangsungkan di Banda Lampung pada hari dan tanggal disebutkan pada bagia awal Akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi sebaga berikut :----------

1. **Tuan ZAIPUL ANWAR B**, Warga Negara Indonesia, lahi di Suka Baru, 02-10-1982 (dua Oktober seribu sembila ratus delapan puluh dua), Pegawai Notaris, Warg Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Griy Asri Blok F Nomor 17, Rukun Tetangga 005, Rukun Warg 000, Kelurahan Segalamider, Kecamatan Tanjung karan Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomo Induk Kependudukan (NIK): 1871030210820004; --------
2. **Tuan DEDI KUSNADI**, lahir di Ujan Mas, Pada Tangga 21-02-1980 (dua puluh satu Februari seribu sembila ratus delapan puluh), Pegawai Notaris, Warga Negar

Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Jalan Sukardi Hamdani nomor 6 Lingkungan I, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 000, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Pemegang Kartu tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1803062102800001. ----------

-Kedua-duanya Asisten Saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.----------

-Segera setelah Saya, Notaris, membacakan Akta ini kepada Penghadap dan saksi-saksi, dan Penghadap membubuhkan sidik jari pada lembaran tersendiri dihadapan Saya, Notaris dan saksi-saksi yang dilekatkan pada minuta Akta ini, maka seketika itu pula Akta ini ditandatangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan Saya, Notaris.----------

-Dibuat dengan tanpa perubahan. ----------

-Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.--

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---------

Notaris Kota Bandar Lampung

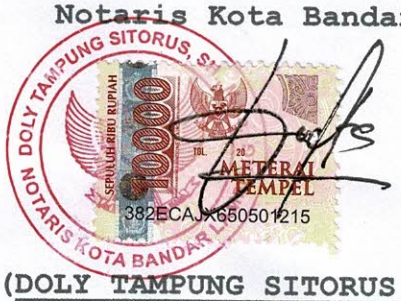

(DOLY TAMPUNG SITORUS, S.H., M.Kn.)

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0001376.AH.01.08.TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN
PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SE INDONESIA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DOLY TAMPUNG SITORUS S.H., M.KN., sesuai Akta Nomor 05 Tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris DOLY TAMPUNG SITORUS S.H., M.KN. tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SE INDONESIA disingkat APHTN-HAN tanggal 19 Juli 2022 dengan Nomor Pendaftaran 6022071931200128 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SE INDONESIA disingkat APHTN-HAN;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan:

PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SE INDONESIA
disingkat APHTN-HAN
NPWP : 601853047023000

berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 05 Tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris DOLY TAMPUNG SITORUS S.H., M.KN. yang berkedudukan di KOTA BANDAR LAMPUNG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Juli 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Juli 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0001376.AH.01.08.TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN
PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SE INDONESIA

Susunan Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
PROF DR M. GUNTUR HAMZAH, SH, MH	7371140801650001	PENGURUS	KETUA UMUM
DR. BAYU DWI ANGGONO, SH, MH	3511022306820002	PENGURUS	SEKRETARIS JENDRAL
DR. DUKE ARIE WIDAGDO, S.H, M.H	7571031212760001	PENGURUS	BENDAHARA
PROF DR MOHAMAD MAHFUD MD	3404071305570001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Juli 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Juli 2022

PERUM PERCETAKAN NEGARA RI

Telah menerbitkan nomor :

BERITA NEGARA No. 058
TAMBAHAN BERITA NEGARA RI No. 000321
Tanggal Terbit 22 Juli 2022

Perubahan

PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SE INDONESIA

Berkedudukan di : JAKARTA PUSAT sesuai dengan Akta No. 05, Tanggal 18 Juli 2022. Yang dibuat oleh Notaris DOLY TAMPUNG SITORUS, S.H., M.Kn.

Jakarta, 20 Juli 2022
a,n Direksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
Ast. Manager Berita Negara RI

EFAN HASBULLAH
NRK. 3050

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberitahuan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

npwp.

KPP PRATAMA JAKARTA SENEN

60.185.304.7-023.000

ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI

JALAN KRAMAT VI NO. 18
KENARI SENEN
KOTA ADM. JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA

Tanggal Terdaftar 14/07/2022

djp